



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2023 ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dan stakeholder lainnya dalam kurun waktu Tahun 2023. Dengan kerja keras serta dukungan dari Instansi dan Komponen masyarakat Papua Barat diharapkan berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik. Namun, disadari bahwa tantangan dalam upaya P4GN cukup besar sehingga memerlukan kerja keras bersama.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan atas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan arahan agar semua yang kita usahakan dapat terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan.

Manokwari, 5 Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Papua Barat



Heri Istu Hariono, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Landasan Hukum	4
BAB II RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BNN	
PROVINSI TAHUN 2023	6
BAB III PENUTUP	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

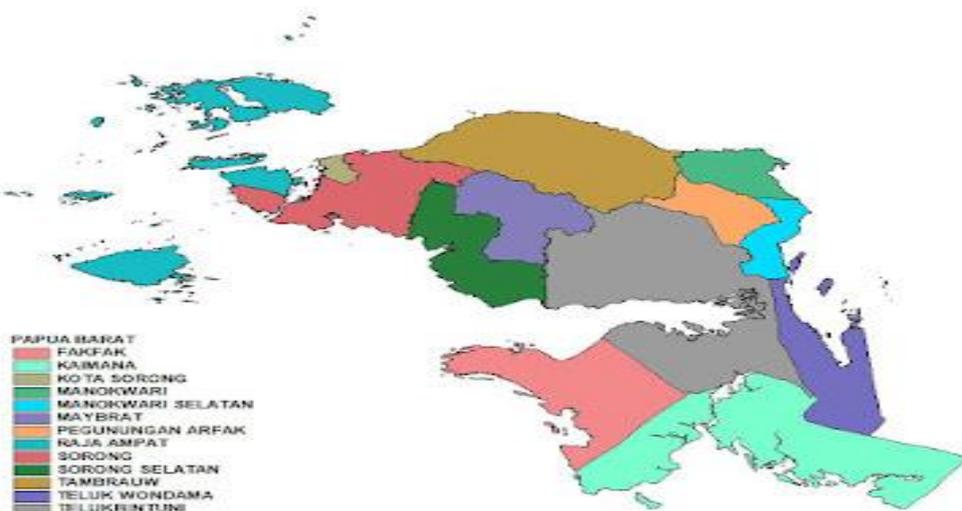
A. Kondisi Umum

1. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 6 Tahun 2020, Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), BNNP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

BNNP Papua Barat berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja mencapai 102.946,15 km² terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong, dengan jumlah populasi 1.156.840 jiwa (sumber : *Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2022*).



Berdasarkan data laporan dari Bidang Pemberantasan BNNP Papua Barat, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Tidak Pidana Narkoba

No	Tahun	Barang Bukti	Jumlah Tersangka
1	2020	Ganja : 4.946 gram	9 Orang
		Sabu : 301,84 gram	
2	2021	Ganja : 11.612,78 gram	7 Orang
		Sabu : 9,9 gram	
3	2022	Ganja : 4.092,22 gram	8 Orang
		Sabu : 33,27 gram	

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih maraknya peredaran Narkoba di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang mulai menyusup ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam mendukung program Pencegahan dan Pembrantasan Penyalah Guna dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, BNNP Papua Barat mengalami sedikit permasalahan seperti :

- a. Adanya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan karena adanya pemotongan anggaran untuk keperluan penanganan Covid-19;
- b. Faktor geografis Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang begitu sulit dijangkau antar kabupaten/kota menjadi salah satu kendala yang sulit dipecahkan, mengingat keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil yang di setiap kaupaten dijadikan sebagai tempat transit oleh para bandar narkoba di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya;
- c. Kurang meratanya kemampuan/skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tiap seksi;
- d. Dari segi sarana dan prasarana BNNP Papua Barat belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga masih harus menyewa ruko dengan biaya yang tinggi, pada bidang pemberantasan belum memiliki peralatan teknologi yang sesuai perkembangan jaman untuk kegiatan intelijen, belum ada

ruang tahanan yang sesuai standar Kementerian Hukum dan HAM, belum ada mobil tahanan serta fasilitas rehabilitasi yang sangat minim;

- e. Karakteristik masyarakat yang unik dan berbeda dengan daerah lain sehingga memerlukan penanganan khusus sesuai karakteristik masyarakat setempat.

BNNP Papua Barat mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, BNNP Papua Barat Menyusun Rencana Kinerja Tahunan guna mendukung program Pencegahan dan Pembrantasan Penyalah Guna dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Papua Barat selama Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2023 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dan stakeholder lainnya dalam kurun waktu Tahun 2023 untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) khususnya di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

2. Hasil Evaluasi

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, BNN Provinsi Papua Barat telah melaksanakan sejumlah kegiatan pada tahun 2022 melalui program yang ada dengan target output sebesar 802 dan realisasi capaian output sebesar 818. Adapun rincian sebagai berikut :

KODE	RINCIAN	TARGET	CAPAIAN	%
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	5	100%
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	2	2	100%
3248.BDD.001	Fasilitasi Program Alternative Development Pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1	1	100%
3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1	1	100%
3256.FAE.001	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	1	1	100%

KODE	RINCIAN	TARGET	CAPAIAN	%
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggapi Ancaman Narkotika	2	2	100%
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	15	23	153%
3258.BIA.002	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika	2	1	50%
3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU	5	8	160%
3259.ADG.001	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	10	10	100%
3259.ADI.001	Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	25	25	100%
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	30	30	100%
3260.BAA.003	Layanan IBM	10	10	100%
3260.BAA.004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkotika (SKHPN)	600	600	100%
3260.BAA.005	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A	3	3	100%
3260.BAA.006	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-B	3	3	100%
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	2	100%
3260.BDB.003	Fasilitas Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota	1	1	100%
3260.BDB.004	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	1	1	100%
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5	5	100%
5936.QDB.001	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	1	1	100%
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	12	100%
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	45	45	100%
3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
3239.EBA.962	Layanan Umum	1	1	100%
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	12	100%
3239.EBB.951	Layanan Sarana Internal	4	9	225%
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	100%
TOTAL		802	817	102%

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Provinsi Papua Barat. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1	Rp110,000,000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5	Rp110,000,000
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	Rp262,784,000
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Rp130,000,000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,46	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Rp243,440,000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	25	
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1	Rp220,996,000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2	
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,31	Rp73,070,000
7	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1	Rp75,000,000
8	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5	Rp525,000,000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Rp173,775,000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
10	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	Rp1,524,273,000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	94	Rp2,593,213,000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi Papua Barat dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Papua Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	1
2	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	10

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	25
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	2
			Layanan rehabilitasi di Klinik BNNP	30
			Layanan Pemeriksaan Psikologi	2
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	100
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2
7	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1
8	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	5
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	-
9	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika (Unit Vertikal)	2
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
10	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Ditangani BNNP	-
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1
		2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	Layanan Manajemen Keuangan	1
		2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	12